

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yaitu sebuah organisasi untuk menegakkan hukum dan mempunyai kekuasaan agar mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu yang biasanya disebut dengan negara. Sesuai dengan keputusan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mengatur mengenai tanggung jawab pengendalian intern terletak pada Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pada instansi pemerintah sesuai yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: PER/05/M.PAN/03/2008. Pengawasan ini mencakup berbagai tugas berbentuk pengauditan, review, evaluasi, mentoring, serta bentuk tindakan pengawasan lainnya.

Kompetensi auditor dapat dipengaruhi dari pengetahuan dan pengalamannya selama menjadi seorang auditor. Untuk melaksanakan tugas audit, auditor harus memiliki pengetahuan audit (umum dan khusus) serta pengetahuan di bidang audit, akuntansi, dan industri klien. Auditor dapat memperoleh pengetahuan ahli sebagai auditor dimulai dengan pelatihan formal, yang kemudian diperluas melalui pengalaman dan praktik audit (SPAP, 2021). Selain itu, auditor juga harus menjalani pelatihan teknis yang dikhususkan kepada auditor yang mencakup baik aspek teknis maupun pelatihan umum.

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilakukan para auditor dapat berbobot apabila telah memenuhi peraturan atau standar audit. Untuk melaksanakan tugasnya, auditor harus mengikuti aturan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2021). Standar auditing tersebut dapat berupa standar umum, standar kerja lapangan dan standar pelaporan. Persyaratan audit dalam Standar Auditing (SA Section 150 SPAP, 2021) terdapat tiga, yaitu:

1. Audit harus dilakukan oleh satu orang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang memadai dan terlatih dalam bidangnya.
2. Dalam semua urusan kontrak, auditor harus menjaga independensi serta objektivitasnya tanpa pandang bulu.
3. Dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporan, pemeriksa wajib menggunakan kompetensi profesionalnya secara hati-hati dan menyeluruh.

Auditor bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan (Putri 2023). Audit internal mempunyai fungsi yaitu kegiatan penilaian independen dalam suatu organisasi yang mencakup peninjauan terhadap kegiatan akuntansi, keuangan, dan lainnya untuk memberikan pelayanan kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Saat melakukan audit, auditor harus mendapatkan kepercayaan klien dan pengguna laporan keuangan. Dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, seseorang auditor harus bertindak independen dari kepentingan klien, pengguna laporan keuangan, serta kepentingan badan akuntan perusahaan itu sendiri (Susanto 2023).

Selama kegiatan audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam menjalankan tugasnya. Independensi lebih menekankan pada organisasi audit internal, sedangkan objektivitas lebih menekankan pada sikap individu. Meskipun independensi tidak tertulis pada prinsip Kode Etik IIA, namun independensi tetap mempunyai makna tersirat dalam prinsip Kode Etik IIA tersebut. Selain itu objektivitas dimasukkan sebagai salah satu prinsip bersama tiga prinsip lainnya (integritas, kerahasiaan, dan kompetensi). Auditor tidak boleh menempatkan dirinya pada posisi dimana objektivitasnya dapat dipertanyakan oleh auditee selama melakukan pengawasan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut kemudian akan menimbulkan kritik dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas audit internal. Indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas:

1. Tidak ada berbagai manfaat.
2. Mengungkapkan kondisi sesuai fakta.

Independensi dan objektivitas merupakan salah satu ciri standar dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI). Dalam peraturan AAIPI Nomor PER-

01/AAPI/DPN/2021 juga menyatakan bahwa auditor internal harus menjaga sikap netral dan tidak memihak serta untuk selalu menghindari potensi konflik kepentingan.

Independensi dan objektivitas tetap menjadi konsep yang sangat penting bagi auditor internal. Keduanya diatur oleh berbagai elemen Kerangka Praktik Profesional Internasional IIA, mulai dari definisi audit internal hingga standar dan kode etik. Mengutip sebagian definisi audit internal IIA: *"Audit internal adalah aktivitas audit dan pemberian nasihat yang independen dan obyektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi."*

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa independensi dan objektivitas menjadi prinsip pedoman seluruh aktivitas audit internal, baik dalam assurance maupun konsalting. Oleh karena itu, auditor harus memiliki tingkat independensi dan objektivitas lebih tinggi ketika melakukan penugasan bersifat assurance, namun bisa lebih rendah ketika memberikan nasihat, adalah tidak benar. Berdasarkan standar SAIPI tidak membedakan keduanya. Standar IIA 1100 yang mengatur independensi dan objektivitas menyatakan: *"Pekerjaan audit internal harus independen, dan auditor internal harus obyektif dalam melaksanakan pekerjaannya."* Dalam interpretasi Standar 1100, independensi diartikan sebagai kondisi bebas dari kondisi yang dapat membahayakan kompetensi auditor internal untuk melaksanakan tugasnya secara tidak memihak.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan BPKP merupakan lembaga publik yang bertugas mengkaji pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ini sebagai aparat pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, sangat membantu pemerintah dalam pengevaluasian kinerja instansi dan lembaga-lembaga serta usaha-usaha milik pemerintah untuk pengelolaan dan pertanggung jawab keuangan negara. Aparat pengawasan intern dapat meminimalkan tindakan kecurangan dalam penyalahgunaan kalporan keuangan. Biasanya perusahaan besar selalu berusaha untuk mengelabui kliennya dalam laporan keuangan. Pada Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan sendiri dituntut harus mempunyai sikap Independensi dan Objektivitas dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dibutuhkan profesionalisme auditor dalam semua hal termasuk rotasi auditor. Oleh karena itu auditor harus memiliki sikap independensi dalam dirinya karena auditor harus mempunyai sikap jujur, tidak mudah terpengaruh dan tidak akan memihak kepada siapapun, karena auditor melakukan pengauditan laporan keuangan hanya untuk kepentingan umum. Maka penulis tertarik dengan permasalahan ini dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Independensi Dan Objektivitas Auditor Yang Diterapkan Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan independensi dan objektivitas yang diterapkan pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana independensi auditor yang diterapkan pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana objektivitas auditor yang diterapkan pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui hubungan antara independensi dan objektivitas yang ada pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui independensi auditor yang diterapkan pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui objektivitas yang diterapkan pada audit pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Manfaat yang diperoleh penulis dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menambah wawasan mengenai independensi dan objektivitas auditor yang diterapkan pada BPKP Provinsi Sumatera Barat auditor sebagai gambaran penerapan ilmu akuntansi yang di terapkan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Dengan adanya kesimpulan dan saran pada akhir laporan ini perusahaan dapat mengevaluasi kinerja pegawai tentang independensi dan objektivitas auditor yang diterapkan pada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan standar-standar audit yang berlaku di Indonesia. Menjalin hubungan baik dengan BPKP.

3. Bagi Universitas Andalas

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penulisan Tugas Akhir bagi perpustakaan Universitas Andalas dan sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang mempunyai pembahasan yang lebih dalam mengenai Independensi dan

Objektifitas Auditor yang Diterapkan pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Baarat.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Adapun tempat magang yang akan dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan di bahas adalah pada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat Jl. Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan kode pos (25177). Kegiatan kuliah kerja lapangan atau magang ini selama tiga bulan dan penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada 22 Januari 2024 sampai 19 April 2024.

1.6 Sistematis Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Hal yang di bahas pada bab ini yaitu berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, lokasi tempat magang dan waktu pelaksanaan kegiatan magang serta sistematis yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Hal-hal yang dibahas pada bab pendahuluan ini dapat mengantarkan pembaca pada pembahasan selanjutnya di bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjabarkan landasan teori sebagai acuan umum dalam kegiatan magang serta digunakan dalam penulisan laporan yang diambil dari berbagai buku terkait sebagai referensi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjabarkan gambaran umum tentang perusahaan mulai dari logo perusahaan, visi dan misi perusahaan sampai moto perusahaan. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas mengenai perusahaan lebih rinci.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai informasi yang didapat pada saat magang terkait dengan tugas akhir dan data yang diberikan oleh perusahaan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan di paparkan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang di ambil dan saran yang di berikan penulis untuk perusahaan yang terkait serta bagi kegiatan magang selanjutnya yang mengambil topik yang sama.